



Fungsi Koordinasi Terhadap Efektifitas Bantuan Korban Bencana Alam pada Organisasi Sosial Taruna Siaga Bencana Provinsi Sulawesi Tengah

¹⁾Taufiq Eka Riandhana, ²⁾Nur Halifah, ³⁾Efendi
^{1,2,3)} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako

*Email ¹⁾ taufiqekariandhana168@gmail.com, ²⁾ nhalifah44@yahoo.com, ³⁾ efendidpmalelea@gmail.com

Diterima: 25-08-2025 | Disetujui: 01-09-2025 | Diterbitkan: 03-09-2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the coordination function affects the effectiveness of natural disaster assistance to the social organization Taruna Siaga Bencana and to determine the inhibiting and supporting factors and alternative solutions. The basis of this study is a survey and this type of research is descriptive research using a qualitative approach, where this study aims to provide a general description of the objective conditions of the social organization Taruna Siaga Bencana (TAGANA) related to the coordination function of the effectiveness of natural disaster assistance to victims. The population in this study is all members of Taruna Siaga Bencana (TAGANA) and communities affected by natural disasters so that the population is 1850 people and sampling is done by purposive sampling, namely part of the population, so the sample is 45 people. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, questionnaires and documentation, while data analysis techniques are qualitative descriptive analysis techniques using frequency tables and presentation tables. The results of the study show that the cooperation, mechanisms and communication of Taruna Siaga Bencana (TAGANA) in disaster management have been categorized as good. However, reporting by Taruna Siaga Bencana (TAGANA) on the number of disaster victims in the field is still less appropriate. Supporting factors include the well-established cooperation, communication, and mechanisms within the social organization, the Disaster Preparedness Cadets (TAGANA), during disaster victim evacuations, which contribute to the community's sense of assistance.

Keywords: Coordination, Effectiveness, Organization

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana fungsi koordinasi terhadap efektifitas bantuan korban bencana alam pada organisasi sosial Taruna Siaga Bencana dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung serta alternatif pemecahannya. Dasar Penelitian ini survey dan tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi objektif pada organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berkaitan dengan fungsi koordinasi terhadap efektifitas bantuan korban bencana alam. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta masyarakat yang terkena bencana alam sehingga populasi berjumlah 1850 orang dan penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sebagian dari populasi, maka sampel berjumlah 45 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan tabel frekuensi dan tabel presentasi. Hasil Penelitian bahwa kerjasama, mekanisme dan komunikasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana sudah masuk

kategori baik. Namun, pelaporan yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) terhadap jumlah korban bencana dilapangan masih kurang sesuai. Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama, komunikasi dan mekanisme yang terjalin dengan baik dalam organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada saat melakukan evakuasi korban bencana sehingga masyarakat merasa terbantu.

Kata Kunci : Koordinasi, Efektifitas, Organisasi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Taufiq Eka Riandhana, Nur Halifah, & Efendi. (2025). Fungsi Koordinasi Terhadap Efektifitas Bantuan Korban Bencana Alam pada Organisasi Sosial Taruna Siaga Bencana Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(3), 963-974. <https://doi.org/10.63822/wt76qt22>

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis” dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor : 82/HUK/2006 Tentang Taruna Siaga Bencana, maka dibentuklah Taruna Siaga Bencana atau yang biasa lebih dikenal dengan nama TAGANA, merupakan suatu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang berbasis masyarakat, dengan demikian yang menjadi inti dalam aktifitas organisasi ini adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam ataupun bencana sosial yang terjadi pada masyarakat, mengingat pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang tidak mudah sehingga diperlukan suatu sikap yang tegas serta dituntut keterampilan, keahlian, kesabaran, prosedur, dedikasi yang tinggi dan adanya pengawasan yang kesemuanya tertata dalam system manajemen yang profesional.

Penanggulangan Bencana Alam Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan TNI, POLRI dan TIM SAR sesuai dengan **TAP MPR no VII tahun 2002 tentang Peran TNI dan POLRI yang** dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang Tugas Bantuan TNI dan POLRI bahwa “TNI dan POLRI bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission)”. Hal inilah yang menjadikan suatu kewajiban bagi TNI dan POLRI untuk menyelenggarakan suatu operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di Indonesia. Kemudian sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (Tim Sar) Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Pasal 2 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BNPB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. Namun, kenyataan dilapangan masih begitu banyak permasalahan yang sering terjadi dan permasalahan yang paling mendasar yang ditemui dilapangan yaitu adanya tumpang tindih pekerjaan dimana antara TIM SAR, TNI dan POLRI tidak terjalin koordinasi yang baik, masing-masing sector bergerak sendiri. Selain itu, didalam distribusi logistik sering kali terjadi keterlambatan dalam hal ini tidak adanya ketepatan waktu dan jumlah bahan logistik yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah korban yang berada dilapangan.

Organisasi sosial Taruna Siaga Bencana koordinasi sangat dibutuhkan dalam hal ini koordinasi dapat terjadi apabila kerjasama yang terjalin didalam organisasi Taruna Siaga Bencana berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diarahkan oleh seseorang yang memiliki kewenangan (Koordinator Lapangan), lalu kemudian mekanisme dalam pelaksanaan tugas kerja dari setiap individu harus jelas sehingga didalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam memiliki prosedur sesuai dengan atauran atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak lupa pula komunikasi juga yang harus terus terjalin karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara anggota Truna Siaga Bencana dan hal yang paling utama yaitu pelaporan dari setiap anggota Taruna Siaga Bencana sehingga jumlah korban bencana dilapangan akurat dan bantuan yang turun kepada korban bencana alam mencukupi.

Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerja sama antar instansi kedalam proses pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seorang yang memiliki kewenangan fungsional tertentu. Sikap ini hanya mungkin ada apabila setiap pihak benar-benar mengerti serta mengahayati kedudukan dan fungsi masing-masing serta kedudukan dan fungsi koordinator. Untuk ini komunikasi yang efektif sangat penting sekali dalam membuka jalan kearah saling pengertian, komunikasi inilah yang dapat dianggap sebagai mekanisme yang ampuh untuk menciptakan koordinasi. Lalu kemudian komunikasi dan saling memberi informasi ini akan menimbulkan saling pengertian (Sugandha, 1991)

LANDASAN TEORI

Koordinasi sendiri berasal dari bahasa Inggris coordination yang berarti being co-ordinate, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis dalam bidang datar, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Sementara pengertian Koordinasi berdasarkan Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 1988 yaitu “kegiatan vertikal di Daerah dimana Upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna”. Oleh sebab itu, Koordinasi sangatlah dibutuhkan dalam setiap organisasi ataupun kelompok demi tercapainya segala tujuan yang hendak dicapai sementara komunikasi merupakan suatu kunci utama dalam tercapainya suatu koordinasi yang efektif dan pada dasarnya koordinasi merupakan suatu proses informasi.

Pengertian yang lebih jelas mengenai koordinasi maka, Sondang P Siagian (1983) mengatakan “Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama, pola koordinasi adalah suatu proses mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintergrasi dengan cara seefisien mungkin”. Lalu penjelasan tersebut dipertegas kembali oleh George R. Terry (dalam Hasibuan 2001) mengatakan “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengerahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”. Sehingga dengan melihat penjelasan diatas maka dapatlah diketahui bahwa koordinasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara bersama dengan tindakan yang seragam.

Ibnu Syamsi (1994) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah tugas pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien”. Lalu kemudian Mooney dan Reilyh (dalam Soewarno Handyaningrat 1993) mengatakan “koordinasi adalah suatu pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”. Oleh karena itu, dengan melihat pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan suatu pencapaian dalam sebuah kelompok dengan pimpinan selaku kepala koordinator untuk mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik.

Selain beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui pula bahwa koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin

organisasi untuk bekerja sama antar instansi kedalam proses pelaksanaan kerja dibawah pengarahannya seorang yang memiliki kewenangan fungsional tertentu. Sikap ini hanya mungkin ada apabila setiap pihak benar-benar mengerti serta mengahayati kedudukan dan fungsi masing-masing serta kedudukan dan fungsi koordinator. Untuk ini komunikasi yang efektif sangat penting sekali dalam membuka jalan kearah saling pengertian, komunikasi inilah yang dapat dianggap sebagai mekanisme yang ampuh untuk menciptakan koordinasi. Lalu kemudian komunikasi dan saling memberi informasi ini akan menimbulkan saling pengertian (Sugandha, 1991).

Dapatlah disimpulkan bahwa koordinasi merupakan sebuah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dan merupakan proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar walaupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya. Seperti tubuh kita yang melakukan koordinasinya dengan sangat baik tanpa pernah kita sadari. Ambil contoh saja kaki. Ketika kita berjalan mereka dengan harmonis saling bergantian melangkah maju. Coba saja bayangkan seandainya kedua kaki kita tidak melakukan koordinasi. Pada saat yang bersamaan dua buah kaki kanan dan kiri melangkah maju, yang terjadi adalah jatuh dan akan merugikan anggota tubuh yang lainnya. Koordinasi akan terjadi jika kita melakukan planning sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Perencanaan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan puncak.

Melengkapi pengertian koordinasi diatas, maka perlu diuraikan tentang bentuk-bentuk koordinasi. Menurut terry (dalam Moekijat 1994) membagi 4 jenis koordinasi, yakni :

1. Koordinasi Internal yang berhubungan dengan penyatu paduan kegiatan-kegiatan, ide-ide dan orang-orang dalam suatu perusahaan
2. Koordinasi eksternal adalah penyatu paduan kegiatan-kegiatan dari suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan dari perusahaan lain dengan kekuatan-kekuatan serta keadaan-keadaan eksternal bagi perusahaan tersebut.
3. Koordinasi vertical adalah penyatu paduan kegiatan-kegiatan diantara tingkat-tingkat dalam struktur organisasi.
4. Koordinasi horizontal berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam tiap tingkat organisasi dan sedikit lebih sulit mencapainya dibandingkan koordinasi vertical. Salah satu alat penting untuk mencapai koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang memberikan informasi kepada pegawai setiap saat.

Soewarno Handayani (1992) berpendapat bahwa ada 2 jenis koordinasi yaitu koordinasi interen dan eksteren, dimana :

1. Koordinasi Interen terdiri atas koordinasi vertical, horizontal dan koordinasi diagonal.
 - a. Koordinasi vertical atau koordinasi structural yaitu antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara structural terdapat hubungan hirarkhis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hirarkhis karena berada pada satu garis komando.
 - b. Koordinasi Horizontal yakni koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan singkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
 - c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tingkat tinggi eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando.

2. Koordinasi eksteren termaksud koordinasi fungsional dimana koordinasi ini hanya bersifat horizontal dan Diagonal.
 - a. Koordinasi eksteren yang bersifat horizontal adalah koordinasi yang dilakukan oleh unsur Kepala dalam sebuah lembaga
 - b. Koordinasi eksteren yang bersifat diagonal yaitu dilakukan oleh Kepala Badan seperti BAKN terhadap para Kepala Biro Kepegawaian tiap-tiap departemen.

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dengan melihat penjelasan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan Sofian Effendi, 2006). Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara transparan tentang kondisi objektif pada organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berkaitan dengan fungsi koordinasi terhadap efektifitas bantuan korban bencana alam. Cresswell (1998), pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sementara menurut Whitney (dalam Nazir 2003), mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sugiyono (2001) bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 27 orang dan keseluruhan masyarakat yang terkena bencana alam di Desa tuva Kecamatan Gumbasa yang berjumlah 455 Kepala Keluarga dengan jumlah Masyarakat 1823 Orang. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 45 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dibahas secara sistematis sesuai urutan indikator yang ditentukan sebagai berikut:

1. Kerjasama Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Kerjasama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya kerjasama yang baik maka dipastikan sebuah pekerjaan yang dihasilkan tidak akan maksimal. Sama halnya dalam penanggulangan bencana yang

dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tanpa ada kerjasama yang baik antara anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan masyarakat maka dapat dipastikan penyaluran bantuan dan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan tidak akan efektif. Oleh karena itu, mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) diperoleh gambaran bahwa terdapat 23 responden atau 51,11 persen mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana sudah baik, 15 responden atau 33,33 persen mengatakan sangat baik, 5 responden atau 11,11 persen mengatakan kurang baik dan sebanyak 2 responden atau 4,44 persen mengatakan kerjasama organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tidak baik. Dengan demikian, tanggapan responden mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam hal penanggulangan bencana sudah dalam kategori baik.

2. Mekanisme/Prosedur Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Parameter ini mengukur bagaimana mekanisme kerja dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana. Hal ini tentu saja dianggap perlu karena apabila mekanisme kerja dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku maka dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat atas hasil kerjanya dilapangan. Oleh karena itu, kemampuan dari masing-masing individu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) harus dikeluarkan secara maksimal untuk pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mengetahui tanggapan responden yang berkaitan dengan mekanisme kerja Taruna Siaga Bencana (TAGANA) diperoleh data terdapat 3 responden atau 6,66 persen mengatakan bahwa mekanisme kerja yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penanggulangan bencana, 7 responden atau 15,55 persen mengatakan kurang sesuai, 18 responden atau 40,00 persen mengatakan sudah sesuai dan sebanyak 17 responden atau 37,77 persen mengatakan kerjasama organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sangat sesuai dalam penanggulangan bencana. Tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden mengenai mekanisme kerja yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penanggulangan bencana.

3. Komunikasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Komunikasi merupakan penilaian parameter yang sangat penting dalam hal penanggulangan bencana karena tanpa adanya komunikasi maka kerjasama dalam sebuah lembaga baik itu lembaga Negara atau lembaga lainnya utamanya lembaga atau organisasi yang menangani penanggulangan bencana tidak akan efektif dalam penyaluran bantuan. Seperti halnya komunikasi yang terjalin pada Taruna Siaga Bencana (TAGANA), baik itu antara anggota Taruna Siaga bencana (TAGANA) dan dengan masyarakat kedua hal ini harus berjalan beriringan karena walaupun komunikasi antara anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berjalan dengan baik tapi komunikasi dengan masyarakat kurang baik maka hal ini akan percuma sebab Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui komunikasi yang terjalin antara anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan masyarakat pada saat melakukan evakuasi korban bencana alam diperoleh hasil 8 responden atau 17,77 persen mengatakan sangat baik, 33 responden atau 73,33 persen mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada saat melakukan evakuasi korban bencana alam sudah sangat baik, 3 responden atau 6,66 persen mengatakan kurang baik dan sebanyak 1 responden atau 2,44 persen mengatakan kerjasama organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tidak baik. Dengan demikian komunikasi yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada saat

melakukan evakuasi korban bencana alam sudah dapat dikategorikan baik.

4. Pelaporan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting didalam penanggulangan bencana hal ini tentu saja untuk mengetahui berapa jumlah korban keseluruhan dari masyarakat didaerah bencana serta masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut sehingga dapat diketahui berapa jumlah bantuan yang harus turun dan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengalami bencana alam, dalam hal ini pelaporan harus sesuai dengan kondisi dilapangan, dalam artian jumlah korban dilapangan dan jumlah bantuan yang turun harus sama karena apabila data yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah korban dilapangan hal ini tentu saja akan menimbulkan sebuah masalah . Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah jumlah bantuan yang turun kepada masyarakat sesuai dengan jumlah korban dari pelaporan dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) diperoleh gambaran terdapat 13 responden atau 28,88 persen mengatakan bahwa jumlah bantuan yang turun kepada masyarakat yang disalurkan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kurang sesuai dengan jumlah korban dilapangan, 12 responden atau 26,66 persen mengatakan tidak sesuai, 11 responden atau 24,44 persen mengatakan sangat sesuai dan sebanyak 9 responden atau 20,00 persen mengatakan pelaporan jumlah korban bencana alam dilapangan dengan jumlah bantuan yang turun kedaerah bencana alam yang dilakukan oleh organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sesuai. Dengan demikian maka pelaporan jumlah korban bencana alam dilapangan dengan jumlah bantuan yang turun dilokasi bencana yang dilakukan oleh organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dinilai kurang sesuai.

5. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

Didalam sebuah program yang akan dikerjakan baik itu didalam sebuah lembaga atau organisasi seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA) haruslah jelas, program yang dijalankan mengarah kemana dan untuk apa sehingga tujuan atau sasarannya dapat diketahui. Suatu program dapat dikatakan baik apabila kejelasan tujuan atau sasarannya sudah mencapai yang diinginkan, sehingga didalam organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kejelasan yang hendak dicapai didalam penanggulangan bencana yaitu, kesiapsiagaan dari setiap anggota Taruna Siaga bencana (TAGANA) dalam kondisi apapun untuk mengatasi dan membantu mengevakuasi korban bencana serta mengatasi dan membantu permasalahan yang ada dilapangan, dimana masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat yang terkena dampak bencana mendapatkan bantuan secara merata baik itu bantuan fisik, sikis dan mengevakuasi korban bencana alam dari daerah rawan ke daerah yang dianggap aman. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh Taruna Siaga Bencanan (TAGANA) sudah mencapai sasarannya maka diperoleh data terdapat 0 responden atau 0,00 persen mengatakan bahwa Taruna Siaga bencana (TAGANA) tidak mencapai tujuan/sasarannya dalam penanggulangan bencana, kemudian sebanyak 18 responden atau 40.00 responden mengatakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah mencapai tujuan/sasarannya dalam penanggulangan bencana sementara 27 responden atau 60.00 persen mengatakan Taruna Siaga bencana (TAGANA) belum mencapai tujuan/sasarannya. Dengan demikian kejelasan tujuan/sasaran yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanggulangan bencana belum mencapai sasaran/tujuannya

6. Penyusunan Program

Parameter ini mengukur bagaimana penyusunan program yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA), apakah sudah sesuai dalam menangani penanggulangan bencana dan dalam bekerja

membagikan bantuan atau belum. Dimana program yang dimaksud yaitu kesiapan anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) itu sendiri dalam menghadapi situasi yang tersulit dan kesiapan kendaraan operasional yang dibutuhkan di tempat bencana alam. Selain itu, didalam penyusunan program disini yaitu perlu adanya kerjasama yang dilakukan antara Taruna Siaga Bencana (TAGANA), TNI, POLRI dan TIM SAR dimana pada penyusunan program ini tentu saja sangat penting agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan dilapangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana program yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menangani penanggulangan bencana diperoleh hasil 8 responden atau 17,77 persen mengatakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sangat sesuai dalam melakukan penanganan penanggulan bencana, sementara 12 responden atau 26,66 persen mengatakan sudah sesuai, sementara 16 responden atau 35,55 persen mengatakan organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kurang sesuai dalam melakukan penanganan penanggulan bencana dan sebanyak 9 responden atau 20,00 persen mengatakan tidak sesuai. Dengan demikian mengenai program yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam hal penanggulangan bencana masih dalam kategori kurang sesuai.

7. Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien

Pada setiap kegiatan didalam sebuah lembaga, termaksud kelembagaan pemerintah atau organisasi apapun pasti memiliki sebuah target dalam pencapaian tujuannya sehingga dalam pelaksanaannya harus efektif dan efisien. Agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka didalam pelaksanaannya harus maksimal, inilah yang coba dilakukan oleh organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dimana didalam menjalankan tugas-tugasnya setiap anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) melakukannya dengan semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dalam penyaluran bantuan yang dilakukan oleh anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah efektif maka diperoleh gambaran terdapat 15 responden atau 33,33 persen mengatakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sudah sangat efektif dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam, sementara 7 responden atau 15,55 persen mengatakan sudah efektif, sementara 18 responden atau 40,00 persen mengatakan mengatakan organisasi sosial Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kurang efektif dalam menyalurkan bantuan dan sebanyak 5 responden atau 11,11 persen mengatakan tidak efektif. Kemudian diketahui bahwa Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan cukup baik karena kerjasama, prosedur kerja dan komunikasi yang terjalin didalamnya sudah sesuai dengan tuntutan dari seorang anggota Taruna Siaga bencana (TAGANA) yang harus bersikap tegas serta memiliki keterampilan, keahlian, kesabaran, prosedur, dedikasi yang tinggi. Dengan adanya koordinasi yang bisa dibilang sudah cukup baik ini maka efektifitas bantuan korban bencana alam dilapangan dapat tersalurkan walaupun belum cukup efektif dan belum mencapai sasaran dalam hal ini sasaran yang dimaksud yaitu belum meratanya pembagian bantuan fisik kepada keseluruhan korban bencana alam.

2. Faktor yang menjadi penghambat yaitu jumlah bantuan yang turun kemasyarakat tidak sesuai dengan jumlah korban dilapangan dan pelaksanaan dari beberapa penyusunan program kerja dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam hal penanggulangan bencana (program yang dilakukan) masih kurang sesuai selain karena tidak meratanya bantuan yang tersebar ke masyarakat masih kurangnya koordinasi yang dilakukan antara lembaga yang menangani penanggulangan bencana alam seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA), POLRI, TNI dan TIM SAR sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam hal pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Faktor Pendukungnya yaitu koordinasi yang terjalin sudah cukup baik antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan rekan kerjanya yaitu Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Koordinator Lapangan sehingga kerjasama, prosedur kerja dan komunikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada tim peneliti yang telah membantu dan memberikan arahan, masukan konstruktif, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan artikel. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Cresswell, 1998. *qualitative & quantitative approaches*. Kik Pres. Jakarta.
- Hasibuan, 2001, *Manajemen, Dasa, Pengertian, dan Masalah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1994, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi 2006. *Metode penelitian survai (Revisi)*. LP3ES. Jakarta .
- Moekijat, 1994. *Koordinasi Sebagai Tinjauan Teoritis*, PT. Badar Maju, Bandung.
- Moh. Nazir. Ph. D, 2003. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor : 82/HUK/2006 TENTANG TARUNA SIAGA BENCANA
- Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 1988 *tentang pengertian Koordinasi*
- Soewarno Handyaningrat S. 1992. *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional*, PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1993. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1978. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya* , PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1983. *Filsafah Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugandha Dann, 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Penerbit Intermedia, Jakarta. 10001. PO BOX 4155.

- Sugandha Dann, 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Penerbit Intermedia, Jakarta. 10001. PO BOX 4155.
- Sugiyono, 2001. *Statistik nonparametris untuk penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- TAP MPR no VII tahun 2002 tentang Peran TNI dan POLRI. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) tentang Tugas Bantuan TNI dan POLRI
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial